

# Inspektorat Bombana Audit Keuangan Delapan Desa di Rarowatu

**Bombana, sultranet.com** - Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melalui Inspektur Pembantu Wilayah III bersama tim melaksanakan audit ketaatan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rarowatu. Kegiatan pengawasan ini berlangsung mulai 27 Februari hingga 9 Maret 2025, dengan ruang lingkup pemeriksaan difokuskan pada pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2024.

Sebanyak delapan desa menjadi objek audit dalam kegiatan ini, yakni Desa Watukalangkari, Ladumpi, Lampeantani, Rarowatu, Lakomea, Pangkuri, Rau-Rau, dan Tahite. Audit ini merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 yang disusun berdasarkan pendekatan risiko oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

Inspektur Daerah Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan unsur pimpinan, auditor, serta seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh tim dalam memastikan kualitas dan objektivitas pengawasan di lapangan.

“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung proses dan mekanisme pengelolaan keuangan di desa, sekaligus menjadi atensi penting bagi kami semua agar pengawasan berjalan sesuai aturan,” ujar Ridwan saat memberikan keterangan di sela kegiatan audit.

Audit ini dilaksanakan berdasarkan beberapa regulasi utama, di antaranya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Inspektur Pembantu Wilayah III sekaligus Pengendali Teknis, H. Akhmad Amin,

S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan merupakan rutinitas tahunan yang bertujuan memperkuat tata kelola keuangan di tingkat desa.

“Pengawasan ini bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan memotret kondisi nyata di lapangan dan memberikan arahan kepada aparatur desa agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel,” kata Akhmad Amin.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pemerintah desa yang menjadi objek audit agar bersikap proaktif dalam proses pemeriksaan. “Kami berharap perangkat desa dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap agar proses audit berjalan lancar dan efisien,” ujarnya.

Audit yang dilaksanakan ini menyasar berbagai aspek mulai dari perencanaan anggaran, realisasi belanja, pengadaan barang dan jasa, hingga pertanggungjawaban akhir tahun. Setiap hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam laporan resmi yang nantinya menjadi dasar evaluasi serta rekomendasi perbaikan.

Kegiatan pengawasan ini juga menjadi bentuk pendampingan langsung dari Inspektorat kepada pemerintah desa dalam mengelola dana publik. Hal ini penting mengingat dana desa merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di wilayah pedesaan.

Menurut Akhmad Amin, peran Inspektorat dalam audit ini bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membina desa agar lebih tertib administrasi, sesuai regulasi, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan secara mandiri.

Dengan selesainya audit ini, Inspektorat Bombana berharap seluruh desa di Kecamatan Rarowatu mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat akuntabilitas publik di tingkat lokal.

---

# Bupati Bombana Tutup Nuzulul Qur'an di Watumelomba, Serahkan 80 Al-Qur'an untuk Warga

**Bombana, sultranet.com** - Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menghadiri acara penutupan Nuzulul Qur'an ke-VII di Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu, Kamis malam, 27 Maret 2025.

Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri Asisten dan Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi warga Watumelomba dalam memperingati turunnya Al-Qur'an serta mempererat ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadhan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam. "Dengan memahami Al-Qur'an, kita akan semakin dekat dengan Allah SWT dan dapat menerapkan ajaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya di hadapan jamaah yang memadati masjid desa.

Sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kualitas keagamaan masyarakat, Bupati Bombana menyerahkan bantuan 80 buah Al-Qur'an kepada masyarakat Desa Watumelomba. Bantuan tersebut disambut antusias oleh warga, yang berharap dapat lebih giat mempelajari kandungan Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami berharap Al-Qur'an ini bisa menjadi sarana memperdalam ilmu agama, menumbuhkan semangat beribadah, dan memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat," ujar Bupati Burhanuddin saat prosesi penyerahan bantuan.

Rangkaian acara juga diisi dengan ceramah agama yang mengupas makna Nuzulul Qur'an dan pentingnya memperbanyak amal ibadah, khususnya di bulan Ramadhan. Para penceramah mengajak masyarakat untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sosial yang harmonis dan penuh toleransi.



Bupati Burhanuddin turut mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyambut kegiatan keagamaan ini. Menurutnya, semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh warga Desa Watumelomba mencerminkan bahwa nilai-nilai keagamaan masih kuat tertanam di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya memperingati turunnya Al-Qur’an, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan, membangun solidaritas, serta menyatukan visi dalam membentuk masyarakat yang religius dan beradab,” kata Burhanuddin.

Ia berharap kegiatan Nuzulul Qur’an seperti ini dapat terus digelar secara berkelanjutan di berbagai desa. Pemerintah Kabupaten Bombana, lanjutnya, selalu membuka ruang bagi kolaborasi dengan masyarakat dan tokoh agama untuk menghidupkan kegiatan keagamaan yang bermakna.

“Saya percaya, masyarakat yang dekat dengan Al-Qur’an adalah masyarakat yang kuat dan berdaya. Karena itu, mari kita jadikan Ramadhan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan mempererat tali silaturahmi,” ucapnya menutup sambutan.

Dengan kegiatan ini, pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata untuk membina kehidupan spiritual masyarakat, khususnya di desa-desa. Dukungan seperti penyediaan Al-Qur’an menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai

keislaman dalam kehidupan sehari-hari warga Bombana.

---

# **Polemik Politeknik Bombana, Begini Respon Bupati H. Burhanuddin**

**Bombana, sultranet.com** - Bupati Bombana menanggapi polemik yang terjadi di Politeknik Bombana (Polina) terkait keterlambatan pembayaran gaji dosen dan nasib ratusan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa beasiswa yang diberikan pemerintah daerah hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, sedangkan operasional kampus sepenuhnya menjadi tanggung jawab yayasan. Jika yayasan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, ia menyarankan agar pimpinan yayasan diganti demi keberlangsungan pendidikan di kampus tersebut.

“Tujuan beasiswa itu untuk mahasiswa, bukan untuk menutupi operasional kampus. Jika yayasan tidak mampu membayar gaji dosen dan mengelola kampus dengan baik, maka harus ada perbaikan. Jika tetap tidak bisa, gantilah kepemimpinan yayasan dengan orang yang mampu menghidupkan institusi ini,” tegasnya. (23/3)

Ia juga menyoroti buruknya manajemen Politeknik Bombana yang berdampak pada kesejahteraan dosen dan staf. Menurutnya, tidak pantas jika kampus membebankan tanggung jawab finansialnya kepada pemerintah daerah, mengingat Polina dikelola oleh yayasan swasta.

“Saya tidak akan menyalurkan beasiswa dari pemerintah daerah jika manajemennya masih seperti ini. Jika ada masalah, selesaikan dulu. Jangan sampai mahasiswa menjadi korban karena ketidakmampuan yayasan dalam mengelola kampus,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada kaitan langsung antara Pemkab Bombana dengan Yayasan Politeknik Bombana. Oleh karena itu, ia tidak akan

mengizinkan dana daerah digunakan untuk kepentingan yayasan jika tidak ada transparansi pengelolaan keuangan.

“Ini yayasan pribadi. Tidak boleh semua ditanggung pemerintah. Yayasan harus punya inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah internalnya. Masa dosennya tidak dibayar, lalu meminta Pemda yang menanggung?” ujarnya.

Bupati Bombana juga mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ada komunikasi dari pihak yayasan kepada Pemkab terkait masalah yang terjadi.

“Karena tidak ada komunikasi, saya anggap mereka masih bisa menangani dan bertanggung jawab. Jika mereka tidak sanggup, sebaiknya mundur dan beri kesempatan kepada manajemen baru yang lebih profesional,” tegasnya.

Menurutnya, jika pengelolaan kampus tidak diperbaiki, maka kualitas pendidikan di Politeknik Bombana akan terus menurun.

“Kami ingin Politeknik Bombana menjadi kampus berkualitas, tetapi bagaimana bisa berkualitas jika manajemennya tidak bagus? Tidak ada kampus yang maju tanpa manajemen yang baik,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui akibat keterlambatan pembayaran gaji dosen dan staf kampus Politeknik Bombana, para dosen dan mahasiswa telah menggelar aksi untuk menuntut hak mereka, terbaru siang tadi (27/3) puluhan mahasiswa menggelar aksi di Kampus Polina menuntut pembayaran gaji dosen dan pengelolaan kampus agar diserahkan ke Pemerintah daerah.

Pewarta : Idris Hayang

---

## **Inspektorat Bombana Kawal Penyerahan LKPD ke BPK Sultra**

**Kendari, sultranet.com** - Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran

2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., kepada Kepala BPK Sultra, Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA di Aula Kantor BPK RI Sultra, Selasa 26 Maret 2025, dan dikawal penuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

Inspektorat daerah mendampingi proses penyerahan dokumen LKPD sebagai bentuk pengawalan terhadap akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Inspektorat bukan hanya sebagai bentuk prosedural, tetapi juga sebagai wujud pengawasan internal yang memastikan seluruh laporan yang disampaikan telah melalui proses reviu yang cermat dan sesuai regulasi.

“Inspektorat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang disampaikan. Kami memastikan seluruh proses penyusunan LKPD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Ridwan.

Ridwan juga menekankan bahwa kerja sama lintas perangkat daerah, khususnya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta tim penyusun LKPD, berjalan dengan baik sehingga laporan keuangan tahun 2023 dapat diserahkan tepat waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penyampaian laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengapresiasi kerja keras Inspektorat dan seluruh tim penyusun LKPD yang telah bekerja secara terstruktur dan profesional. Menurutnya, keberhasilan penyampaian LKPD tepat waktu merupakan hasil dari kerja kolektif yang terintegrasi antar instansi.

“Penyerahan LKPD ini tidak lepas dari peran strategis Inspektorat sebagai pengawal mutu laporan keuangan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal demi terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik,” kata Ahmad Yani.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil audit dari BPK nanti akan menjadi tolok ukur dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih akurat dan bertanggung jawab.

“Kami tidak hanya ingin mendapatkan opini terbaik, tapi juga menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem keuangan daerah,” tambahnya.

Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menyambut baik penyerahan LKPD Bombana yang tepat waktu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif Inspektorat sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem keuangan daerah.

“Kolaborasi antara Inspektorat dan penda dalam penyusunan laporan ini patut diapresiasi. Pemeriksaan yang akan kami lakukan bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memberikan rekomendasi yang konstruktif,” ujar Dadek.

Ia berharap proses pemeriksaan ke depan berjalan lancar dan mampu memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Bombana.

Langkah Pemerintah Daerah Bombana yang terus menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui dukungan pengawasan internal menjadi cerminan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Kehadiran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, namun sebagai mitra strategis dalam pembangunan tata kelola keuangan yang andal dan dipercaya publik.

---

## **185 Narapidana di Rutan Raha Dapat Remisi Lebaran, Satu Orang Langsung Bebas**

**Muna, sultranet.com** - Sebanyak 185 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Raha menerima remisi khusus Idul Fitri tahun ini, Rabu (26/3/2025). Dari jumlah tersebut, satu orang di antaranya langsung menghirup udara bebas.

Kepala Rutan Kelas IIB Raha, Asril Yasin A. Tahyas, mengungkapkan bahwa

remisi ini diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

“Remisi yang diberikan bervariasi, ada yang 15 hari, satu bulan, hingga dua bulan. Bahkan, satu warga binaan berhak langsung bebas,” ujar Asril saat ditemui di ruang kerjanya.

Dari rincian yang ada, 18 orang menerima remisi selama 15 hari, 128 orang mendapatkan remisi satu bulan, 25 orang memperoleh potongan masa tahanan selama 1,5 bulan, dan 13 orang lainnya menerima remisi maksimal dua bulan.

Asril menegaskan bahwa remisi ini bukan hak mutlak. Jika dalam masa pembinaan seorang narapidana melanggar aturan, maka hak remisinya dapat dicabut.

“Remisi bisa gugur apabila warga binaan melakukan pelanggaran selama menjalani masa tahanan,” tegasnya.

Selain pemberian remisi, Rutan Kelas IIB Raha juga tengah bersiap menghadapi lonjakan kunjungan keluarga narapidana selama perayaan Idul Fitri. Untuk mengantisipasi kepadatan, pihak rutan telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung.

“Kami akan menyediakan tenda dan tambahan kursi bagi para pengunjung. Selain itu, jumlah petugas yang bertugas di bagian pemeriksaan dan pelayanan juga akan kami tambah,” jelasnya.

Sebagai bentuk kelonggaran, Rutan Raha akan memperbolehkan lebih banyak anggota keluarga untuk berkunjung saat lebaran.

“Biasanya ada batasan jumlah pengunjung, tetapi khusus Idul Fitri, kami memperbolehkan hingga enam atau tujuh orang dalam satu kali kunjungan. Kami juga menyediakan tenda khusus agar keluarga bisa lebih nyaman saat bertemu,” tambahnya.

Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada para narapidana agar tetap bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga meski dalam keterbatasan.

“Ini momen spesial bagi warga binaan dan keluarga mereka. Kami ingin mereka tetap bisa merasakan kebersamaan, meskipun berada di dalam rutan,” pungkas

Asril.

---

# Inspektorat Bombana Evaluasi Kinerja OPD dan Kecamatan Lewat AKIP 2024

**Bombana, sultranet.com** - Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Evaluasi ini berlangsung sejak 25 Februari hingga 13 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Tina Orina, Lantai 1, Kantor Bupati Bombana.

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang transparan dan berorientasi pada hasil. Sebanyak 31 OPD dan 22 kecamatan menjadi objek pemeriksaan dalam kegiatan ini.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., mengatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim, dengan susunan teknis yakni Pengendali Teknis Arniati A., S.STP., M.Si. dan Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KM., M.M. "Evaluasi AKIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi pemerintah," ujarnya.

Ridwan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki dampak strategis terhadap sistem pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia berharap agar hasil evaluasi menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan dalam merancang kebijakan dan program kerja yang lebih baik di masa mendatang.

Arniati A., selaku Inspektur Pembantu Wilayah II, turut menjelaskan bahwa

tujuan utama dari Evaluasi AKIP ini adalah untuk mengukur seberapa jauh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan di masing-masing OPD dan kecamatan. “Evaluasi ini mendorong pencapaian kinerja yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. SAKIP mengajarkan kita untuk bekerja terukur dan bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dibelanjakan,” kata Arniati.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa evaluasi ini mengacu pada regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, termasuk dalam penyusunan indikator, pengukuran hasil, hingga tindak lanjut rekomendasi.

Dalam pelaksanaannya, proses evaluasi berjalan interaktif dengan melibatkan tim perencana dan pejabat terkait dari masing-masing unit kerja. Mereka diminta menyampaikan dokumen pendukung kinerja, serta memaparkan capaian, hambatan, dan rencana perbaikan atas program kerja yang telah dijalankan selama Tahun Anggaran 2024.

“Harapan kami ke depan, para perencana di OPD dan kecamatan bisa menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan tim AKIP. Semua saran yang diberikan adalah untuk perbaikan bersama demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel,” ucap Arniati.

Evaluasi AKIP ini bukan sekadar menilai dokumen administratif, tetapi lebih pada bagaimana unit kerja pemerintah menunjukkan kinerjanya secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. Implementasi SAKIP menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintahan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Di akhir kegiatan, Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memberikan pembinaan teknis kepada OPD dan kecamatan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan edukatif, diharapkan semua unit kerja di Kabupaten Bombana semakin siap menghadapi tantangan birokrasi yang modern dan profesional.

---

# Bupati Kolaka Utara Paparkan LKPJ 2024, Puji Kemitraan dengan DPRD

**Sultranet.com, Lasusua** | Bupati Kolaka Utara, Nurrahman Umar, memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kolaka Utara yang digelar di Ruang Paripurna, Senin (24/03/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti berbagai pencapaian pemerintah daerah sekaligus mengapresiasi kemitraan dengan DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam penyampaiannya, Bupati menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2024.

“LKPJ ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi bersama. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” ujar Nurrahman Umar.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pembangunan daerah berjalan dengan optimal. Ia mengapresiasi DPRD Kolaka Utara yang telah bekerja sama dalam mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah.

“Keberhasilan program-program pembangunan tidak lepas dari peran DPRD Kolaka Utara. Kemitraan yang solid antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.



Selain membahas capaian pemerintah daerah, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat Muslim di Kolaka Utara. Ia berharap momentum Ramadan dapat semakin mempererat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Dikonfirmasi terpisah Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, turut memberikan tanggapan atas pemaparan LKPJ tersebut. Menurutnya, transparansi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun daerah yang lebih maju.

“LKPJ merupakan cerminan dari upaya pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Dengan adanya evaluasi bersama, kita dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Kolaka Utara,” kata Syahlan Launu.

Syahlan juga menekankan pentingnya peran komunikasi dan informasi dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan dan bagaimana peran setiap elemen dalam mendukung kemajuan daerah,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat

sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

---

## **Berkah Ramadhan, PGRI Bombana Berbagi Paket Sembako**

**BOMBANA, sultranet.com** - Menyemarakkan bulan suci Ramadhan, PGRI Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk paket bingkisan yang berisi kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 21 Maret 2025, ini merupakan bagian dari upaya PGRI Bombana untuk berbagi berkah di bulan yang penuh rahmat ini. Sumber dana untuk bantuan tersebut berasal dari iuran anggota PGRI Bombana. Minggu (23/3)

Ketua PGRI Kabupaten Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. "Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini," ujar H. Kandamang saat menyerahkan bingkisan.

Bantuan yang disalurkan sebanyak 70 paket bingkisan tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah di Kabupaten Bombana. Penerima bantuan terdiri dari keluarga kurang mampu, janda, dan kaum dhuafa yang membutuhkan uluran tangan. "Bantuan ini berasal dari iuran para anggota PGRI. Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, sehingga bulan Ramadhan menjadi lebih bermakna bagi mereka," kata H. Kandamang menambahkan.

Selain memberikan bantuan, PGRI Kabupaten Bombana juga berharap agar kegiatan semacam ini dapat mempererat hubungan antara sesama warga dan memperkuat semangat gotong royong dalam masyarakat. "Kita ingin, meskipun

hanya dengan sedikit, dapat memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Ini juga bentuk kepedulian kami sebagai organisasi profesi kepada masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pengurus PGRI dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Dalam acara tersebut, para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian yang diberikan, terutama di bulan suci ini. “Kami sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan dari PGRI Bombana,” ungkap salah satu penerima bantuan.

PGRI Bombana berharap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi kepada organisasi lain untuk turut serta dalam memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadhan. Harapannya, semoga setiap bantuan yang diberikan dapat membawa berkah dan menjadi amal jariyah bagi mereka yang turut menyumbang.

**Penulis: Idris Hayang**

---

## **Gub Sultra Pimpin Upacara HKN**

Kendari, sultranet.com | Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumareruka, memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (17/3/2025). Upacara yang diikuti oleh Wakil Gubernur Sultra, Sekretaris Daerah Sultra, kepala OPD, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya disiplin, profesionalisme, dan nasionalisme di kalangan ASN.

Dalam amanatnya, Gubernur menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada umat Muslim dan berharap ibadah yang dilakukan dapat diterima oleh Allah SWT. Ia juga menekankan bahwa kehadiran ASN dalam upacara HKN mencerminkan kepatuhan terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan masyarakat.

“Nasionalisme harus terus ditanamkan dalam diri setiap ASN, baik melalui pengetahuan maupun ideologi. Sebagai tulang punggung negara, ASN harus memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai kebangsaan agar dapat menjalankan tugas dengan profesional,” ujar Andi Sumareruka.

Ia menyoroti menurunnya pemahaman generasi muda terhadap simbol-simbol negara dan nilai kebangsaan akibat kemajuan teknologi. Menurutnya, meskipun teknologi membawa kemudahan, di sisi lain juga berpotensi mengurangi kesadaran akan pentingnya mempertahankan identitas dan persatuan bangsa.

Gubernur mengingatkan bahwa upacara HKN tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Disiplin harus menjadi bagian dari kehidupan ASN dan dibangun melalui kebiasaan serta kesadaran diri. Untuk meningkatkan semangat kerja, ia memperkenalkan sistem penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik. Penilaian dilakukan setiap pekan di masing-masing biro atau dinas, dan pegawai terbaik akan mendapatkan penghargaan setiap hari Senin.

“Siapa yang bekerja dengan baik akan kita beri penghargaan, sedangkan yang tidak menunjukkan kinerja optimal akan diberikan sanksi. Dengan sistem ini, kita ingin membangun budaya kerja yang lebih baik,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur juga mengumumkan hasil penilaian kinerja biro di lingkup Pemprov Sultra. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah meraih juara pertama, disusul oleh Biro Ekonomi di posisi kedua, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa di peringkat ketiga.

Gubernur berharap agar seluruh ASN terus meningkatkan semangat kerja, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas demi kemajuan Sulawesi Tenggara.

---

# ASN di Bombana Ditangkap karena Narkoba

**Sultranet.com, Bombana** | Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, ditangkap Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bombana atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pelaku, yang diketahui bernama Jumran, S.Pd alias Jo (41), diamankan di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, pada Sabtu (22/3) malam.

Kasat Resnarkoba Polres Bombana, AKP Muh. Arman, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan seorang pria yang diduga akan melakukan transaksi narkotika.

“Berdasarkan informasi tersebut, tim kami segera melakukan penyelidikan dan menemukan seorang pria yang kemudian diketahui bernama Jumran di halaman belakang rumah warga. Saat dilakukan interogasi, ia mengaku sedang mencari lokasi narkotika yang ia pesan seharga Rp300.000, yang diarahkan melalui WhatsApp oleh seseorang berinisial MA,” ujar AKP Arman.

Petugas kemudian membawa Jumran ke lokasi yang dimaksud, berdasarkan foto yang dikirim oleh MA. Setibanya di tempat itu, Jumran langsung mengambil satu paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam pipet plastik warna pink dan diselipkan di dalam bambu. Aksi ini disaksikan langsung oleh personel Satresnarkoba serta masyarakat setempat.

“Jumran mengakui bahwa narkotika tersebut ia beli untuk dikonsumsi bersama MA. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan MA,” tambah AKP Arman.

Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti berupa satu paket sabu dengan berat bruto 0,41 gram, satu lembar potongan tisu putih, satu potongan plastik warna pink, serta satu unit ponsel merek Vivo warna biru dengan kartu SIM XL.

Jumran yang diketahui merupakan warga Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, kini telah diamankan di Mapolres Bombana guna menjalani

pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Pelaku saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan kami akan terus mendalami kasus ini untuk mengetahui jaringan peredaran narkotika yang melibatkan pelaku,” pungkas AKP Arman.

Pewartu : Azuli